

## Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community

<sup>1</sup>Tekot Sukomardojo, Ryan Aldiansyah Akbar, Zaenal Aripin, Fakhry Amin, Endang Fatmawati

<sup>1</sup>Politeknik Penerbangan Surabaya, Indonesia; Email : [sukomardojo@gmail.com](mailto:sukomardojo@gmail.com)

*Received: March 28, 2023; In Revised: April 22, 2023; Accepted: May 13, 2023*

### Abstract

Digital transformation affects various conditions and aspects of human life. One of the areas affected is public administration. This research aims to see and explore how digital transformation and public administration and the impact it has on the political and economic awareness of people who have started to be connected by the presence of technology. This research was carried out using a qualitative approach to be able to see how digital transformation in public administration can affect the political economy of society. The results of this study found that there was a significant impact on political economy awareness and the way government works as a whole as a result of digital transformation in public administration. This is because the existence of public transformation can increase efficiency, transparency and participation for the community. In the context of political economy awareness, digital transformation enables wider and inclusive participation from society. Through digital platforms, the public can provide input, express opinions, and participate in relevant discussions.

**Keywords:** Digital transformation, Public Administration, Political Economy Awareness, Society.

### Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi dan beroperasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam administrasi publik. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik (Rahadi & Wadirman, 2022). Administrasi publik merupakan sistem yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks transformasi digital, administrasi publik dapat mencakup penggunaan platform online, analisis data, dan kebijakan e-government untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas administrasi publik (Scupola & Mergel, 2022).

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam administrasi publik telah memungkinkan adanya perubahan yang signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administratif serta mempercepat pengambilan keputusan (Myeong & Jung, 2019). Dalam era digital ini, pemerintah telah mengadopsi berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi berbasis online, sistem e-government, dan analisis big data. Hal ini bertujuan untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan tata kelola yang lebih baik (Al-Zahrani, 2020).

Transformasi digital dalam administrasi publik juga telah membuka peluang baru bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kebijakan publik. Melalui platform online dan jejaring sosial, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan berkolaborasi dengan pemerintah (Valle-Cruz et al., 2020). Dalam konteks politik ekonomi, kesadaran politik ekonomi mencakup pemahaman individu terhadap hubungan antara kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Transformasi digital dalam administrasi publik dapat mempengaruhi

kesadaran politik ekonomi dengan meningkatkan akses informasi dan transparansi (Mattioli et al., 2020).

Transformasi digital merujuk pada perubahan fundamental dalam organisasi, proses, dan model bisnis yang disebabkan oleh adopsi dan pemanfaatan teknologi digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara kerja, berinteraksi, dan menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan (Priyono et al., 2020). Transformasi ini melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam seluruh lapisan organisasi, termasuk infrastruktur, sistem, proses, budaya, dan strategi bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, adaptabilitas, dan pengalaman pelanggan (Machado et al., 2021).

Transformasi digital meliputi penggunaan teknologi seperti komputasi awan, Internet of Things (IoT), analitik data, kecerdasan buatan (AI), robotika, dan otomasi proses bisnis. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data secara lebih efektif. Dalam prosesnya, transformasi digital juga melibatkan perubahan dalam cara organisasi berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Penggunaan platform digital, media sosial, aplikasi mobile, dan teknologi komunikasi lainnya memungkinkan koneksi yang lebih baik dan pengiriman layanan yang lebih cepat (Bisht et al., 2022).

Transformasi digital tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan sikap organisasi. Organisasi yang mengadopsi transformasi digital harus terbuka terhadap perubahan, berinovasi, dan memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Terdapat berbagai keuntungan kompetitif bagi organisasi, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, fleksibilitas, dan pelayanan pelanggan yang lebih baik melalui transformasi digital. Hal ini juga dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan produk dan layanan yang inovatif (Roblek et al., 2021).

Melalui transformasi digital, masyarakat dapat mengakses informasi ekonomi secara lebih mudah, seperti data dan statistik terkini. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu ekonomi yang relevan, seperti inflasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (Manita et al., 2020). Dengan partisipasi dalam platform e-partisipasi dan jejaring sosial, individu dapat berbagi pandangan, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan sesama untuk mengembangkan pemahaman politik ekonomi yang lebih baik. Ini memperluas ruang publik untuk berbagai perspektif dan pemikiran yang dapat mempengaruhi kesadaran politik ekonomi (Simonofski et al., 2021).

Kesadaran politik ekonomi menggambarkan pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat tentang hubungan yang kompleks antara politik dan ekonomi dalam konteks pembuatan keputusan politik dan implikasinya terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Dalam pemahaman kesadaran politik ekonomi, "kesadaran" merujuk pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman individu atau masyarakat tentang isu-isu politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Kesadaran politik ekonomi melibatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi, mekanisme politik, distribusi kekuasaan, perekonomian, dan isu-isu sosial yang terkait dengan aspek ekonomi suatu negara (Lahsen & Ribot, 2022).

Selain itu, kesadaran politik ekonomi juga melibatkan pemahaman tentang dampak kebijakan politik terhadap sektor ekonomi, lapangan kerja, tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kesinambungan pertumbuhan. Kesadaran ini akan mendorong individu atau masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, keterlibatan dalam kelompok advokasi, serta partisipasi dalam debat dan diskusi publik. Dalam konteks kesadaran politik ekonomi, penting untuk memahami kepentingan dan preferensi

berbagai kelompok ekonomi dalam masyarakat, termasuk pengusaha, pekerja, konsumen, dan organisasi nirlaba (Ali et al., 2021).

Selanjutnya kesadaran politik ekonomi juga melibatkan pemahaman tentang isu-isu global seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan kerja sama ekonomi antar negara. Pemahaman tentang kesadaran politik ekonomi juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam konteks politik dan ekonomi (O'Donovan, 2020). Pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi kebijakan politik dapat memengaruhi keputusan memilih calon politik, mendukung inisiatif legislasi, atau terlibat dalam gerakan sosial. Kesadaran ini melibatkan partisipasi aktif dalam dialog dan perdebatan mengenai kebijakan ekonomi serta advokasi untuk perubahan kebijakan yang dianggap lebih adil dan berkelanjutan (Hess, 2019).

Namun, transformasi digital dalam administrasi publik juga menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan digital yang dapat membatasi akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran politik ekonomi, terutama bagi mereka yang terpinggirkan atau kurang mampu (Jamil, 2021). Oleh karena itu, studi mengenai transformasi digital dalam administrasi publik dan dampaknya terhadap kesadaran politik ekonomi memiliki relevansi yang penting. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik serta memperkuat kesadaran politik ekonomi di era digital ini.

### **Metode**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi, sikap, dan pengalaman individu terkait dengan transformasi digital dalam administrasi publik dan dampaknya terhadap kesadaran politik ekonomi. Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi aspek subjektif yang kompleks dalam konteks penelitian ini. Penelitian ini akan mendasarkan analisis pada studi literatur mendalam yang mencakup konsep-konsep kunci dalam administrasi publik, transformasi digital, dan kesadaran politik ekonomi. Dengan menggali data dari analisis dokumen dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran transformasi digital dalam administrasi publik dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesadaran politik ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi dalam memahami hubungan antara transformasi digital dan kesadaran politik ekonomi dalam konteks administrasi publik.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Transformasi Digital dalam Administrasi Publik**

Transformasi digital dalam administrasi publik merujuk pada perubahan fundamental dalam cara lembaga pemerintah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi ini melibatkan penerapan teknologi digital dan integrasi sistem untuk meningkatkan proses administratif, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan masyarakat. Berbagai teknologi digital telah menjadi pilar utama dalam transformasi digital administrasi publik. Big data analytics memungkinkan analisis data yang mendalam untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dalam pengambilan keputusan. Cloud computing menyediakan infrastruktur yang skalabel dan fleksibel untuk menyimpan dan mengelola data. Kecerdasan buatan (AI) digunakan dalam otomatisasi proses, pengenalan pola,

dan pengambilan keputusan cerdas. Internet of Things (IoT) memungkinkan koneksi antara perangkat untuk berbagi data secara real-time. Blockchain menawarkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data dan transaksi.

Implementasi transformasi digital dalam administrasi publik melibatkan strategi dan langkah-langkah yang matang. Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan masalah keamanan data. Penting bagi lembaga pemerintah untuk merencanakan dan mengelola perubahan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti kepemimpinan yang kuat, keterlibatan masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan kemitraan dengan sektor swasta. Transformasi digital membawa manfaat yang signifikan bagi administrasi publik. Peningkatan efisiensi operasional terjadi melalui otomatisasi proses, penggunaan data yang lebih efektif, dan pengurangan birokrasi. Pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui akses yang lebih mudah dan cepat, layanan online, dan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga meningkat melalui platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, memberikan umpan balik, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang lebih informasional terjadi dengan adanya akses real-time terhadap data dan analisis yang mendalam.

Penting untuk menjaga keberlanjutan dan skalabilitas transformasi digital dalam administrasi publik. Hal ini melibatkan pemeliharaan infrastruktur teknologi, pembaruan kebijakan dan regulasi yang relevan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan investasi jangka panjang dalam teknologi dan inovasi. Transformasi digital juga melibatkan perubahan budaya dan paradigma dalam administrasi publik. Masyarakat harus menerima dan beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk penggunaan teknologi, aksesibilitas data, dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks transformasi digital, keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama. Administrasi publik harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan dalam transformasi digital dijaga dengan baik dan privasi individu dijaga dengan baik. Transformasi digital dalam administrasi publik mendorong kerja sama antar lembaga. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam memastikan kesuksesan transformasi digital dan mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan teknologi.

Penting untuk melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap transformasi digital dalam administrasi publik. Indikator kinerja dan metrik harus ditetapkan untuk melacak kemajuan dan dampak transformasi digital. Transformasi digital dalam administrasi publik terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat. Tantangan seperti kecepatan teknologi yang cepat, penyesuaian regulasi, dan inklusi digital perlu diatasi. Namun, ada juga peluang besar untuk terus memperbaiki layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan transformasi digital dalam administrasi publik.

### **Hubungan antara Transformasi Digital dan Administrasi Publik**

Transformasi digital memiliki peran krusial sebagai pendorong perubahan dalam administrasi publik. Melalui penerapan teknologi digital, seperti big data analytics dan kecerdasan buatan, administrasi publik dapat mengoptimalkan proses kerja, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Transformasi digital juga memungkinkan adopsi model kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah

memiliki peran kunci dalam mengadopsi dan mengelola transformasi digital dalam administrasi publik. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi yang memadai, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Pemerintah juga perlu mendorong budaya inovasi, kolaborasi dengan sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat dalam proses transformasi digital.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi penting dalam mendorong transformasi digital dalam administrasi publik. Kemitraan strategis antara kedua sektor ini memungkinkan berbagi sumber daya, akses terhadap teknologi dan keahlian, serta pengembangan solusi inovatif. Dalam kolaborasi ini, sektor swasta dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi teknologi digital, sementara sektor publik membawa pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan tugas-tugas administratif yang spesifik. Transformasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola publik. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, transformasi digital juga dapat meningkatkan akuntabilitas melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui platform digital yang memungkinkan kolaborasi dan umpan balik yang lebih aktif. Transformasi digital juga berpotensi meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan dengan memastikan akses yang setara terhadap informasi dan layanan publik.

Transformasi digital memerlukan pengembangan keterampilan digital yang mencakup pemahaman tentang teknologi digital, analisis data, keamanan siber, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Administrasi publik perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa pegawai publik memiliki keterampilan yang relevan dan mampu menghadapi tantangan yang terkait dengan transformasi digital. Transformasi digital juga membawa risiko dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Salah satunya adalah risiko keamanan siber yang meningkat dengan adanya konektivitas yang lebih luas. Administrasi publik harus melibatkan keahlian dalam keamanan siber untuk melindungi data dan infrastruktur digital. Tantangan lainnya termasuk ketimpangan akses digital yang dapat meningkatkan kesenjangan digital antara masyarakat, perubahan budaya organisasi yang kompleks, dan perlunya menciptakan regulasi yang relevan untuk mengatasi perubahan teknologi yang cepat.

Selain itu, transformasi digital mendorong adopsi model kerja yang lebih digital dan fleksibel dalam administrasi publik. Model kerja yang berbasis digital memungkinkan kolaborasi virtual, penggunaan alat kerja digital yang efisien, dan akses terhadap informasi secara real-time. Administrasi publik perlu mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung adopsi model kerja digital ini, termasuk akses internet yang luas, alat kerja digital yang memadai, dan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Transformasi digital dalam administrasi publik menghasilkan jumlah data yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan data yang efektif dan analitik menjadi kunci dalam memperoleh wawasan dan informasi yang bernilai. Administrasi publik perlu memiliki sistem pengelolaan data yang baik, keahlian analitik yang memadai, dan pemahaman tentang penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti.

Transformasi digital juga harus memperhatikan inklusi digital dan aksesibilitas untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses administrasi publik. Administrasi publik perlu memastikan bahwa akses ke teknologi digital dan layanan publik secara adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan aksesibilitas. Penting untuk melakukan evaluasi dampak dan perubahan

yang dihasilkan dari transformasi digital dalam administrasi publik. Melalui pengukuran kinerja dan evaluasi yang berkelanjutan, dapat diperoleh pemahaman tentang efektivitas transformasi digital, manfaat yang diperoleh, serta area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Evaluasi ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan dalam administrasi publik.

### **Dampak Transformasi Digital terhadap Kesadaran Politik Ekonomi**

Transformasi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara kerja dan meningkatkan kinerja administrasi publik. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi seperti big data analytics, kecerdasan buatan, dan blockchain. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Teknologi digital memiliki dampak signifikan pada kesadaran politik ekonomi. Melalui transformasi digital, informasi politik dan ekonomi dapat dengan cepat diakses dan disebarluaskan kepada masyarakat secara luas. Teknologi digital juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, serta memfasilitasi diskusi yang lebih terbuka dan inklusif.

Kemudian transformasi digital dalam administrasi publik memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih efisien. Hal ini berdampak pada kemampuan pemantauan dan evaluasi kebijakan politik dan ekonomi. Data yang dihasilkan oleh teknologi digital dapat digunakan untuk mengukur dan memahami dampak kebijakan, serta membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih informasional. Transformasi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan dalam terhadap informasi politik dan ekonomi. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses berita, laporan, dan data terkait dengan kebijakan politik dan ekonomi secara real-time. Ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkini dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Kesadaran politik ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan melalui transformasi digital. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi politik dan ekonomi, masyarakat menjadi lebih sadar akan isu-isu terkait kebijakan publik, perubahan ekonomi, dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan ekonomi, serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Transformasi digital juga memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan ekonomi. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan umpan balik, memberikan pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan kebijakan politik dan ekonomi. Ini memungkinkan suara masyarakat didengar dan memengaruhi pengambilan keputusan, menciptakan proses yang lebih demokratis dan inklusif.

Dalam transformasi digital, pengambilan keputusan politik dan ekonomi didasarkan pada data dan informasi yang lebih informasional. Teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Keputusan yang diambil berdasarkan data yang terpercaya dan informasi yang terkini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif pada masyarakat. Transformasi digital kemudian dapat berdampak pada paradigma administrasi publik. Administrasi publik menjadi lebih responsif dan terbuka terhadap perubahan politik dan ekonomi yang cepat. Perubahan teknologi digital mempengaruhi tata kelola dan strategi administrasi publik, yang pada gilirannya memengaruhi kesadaran politik ekonomi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam transformasi digital, keamanan data dan privasi menjadi isu penting. Dengan adanya pertukaran informasi politik dan ekonomi melalui platform digital, perlindungan data

pribadi dan kerahasiaan informasi menjadi perhatian utama. Administrasi publik perlu mengadopsi langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif dan memastikan privasi individu terjaga. Transformasi digital dalam administrasi publik berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Teknologi digital memungkinkan adopsi layanan publik yang lebih efisien, responsif, dan terjangkau. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan publik melalui platform digital, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### Kesimpulan

Transformasi digital dalam administrasi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran politik ekonomi dan mengubah cara kerja pemerintahan secara keseluruhan. Melalui adopsi teknologi digital dan implementasi strategis, administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam hal ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi penting untuk mencapai hasil yang optimal. Pada tingkat konseptual, transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara kerja administrasi publik. Hal ini melibatkan adopsi teknologi seperti big data analytics, kecerdasan buatan, cloud computing, dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administratif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, administrasi publik dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik, memperkuat transparansi, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kesadaran politik ekonomi, transformasi digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif dari masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi yang relevan. Pengambilan keputusan berbasis data juga dapat memperkuat kesadaran politik ekonomi dengan menginformasikan kebijakan yang lebih efektif dan terukur. Namun, penting untuk memperhatikan implikasi sosial dan etis dalam transformasi digital, seperti privasi data dan kesenjangan digital, sehingga kesadaran politik ekonomi dapat ditingkatkan secara inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat.

### Referensi

- Ahn, M. J., & Chen, Y. C. (2022). Digital transformation toward AI-augmented public administration: The perception of government employees and the willingness to use AI in government. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101664.
- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review. *Scientific African*, 12, e00756.
- Alvarenga, A., Matos, F., Godina, R., & CO Matias, J. (2020). Digital transformation and knowledge management in the public sector. *Sustainability*, 12(14), 5824.
- Al-Zahrani, M. (2020). Integrating IS success model with cybersecurity factors for e-government implementation in the Kingdom of Saudi Arabia. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 10(5), 4937-4955.
- Ayuningtyas, D., Haq, H. U., Utami, R. R. M., & Susilia, S. (2021). Requestioning the Indonesia government's public policy response to the COVID-19 pandemic: black box analysis for the period of January–July 2020. *Frontiers in Public Health*, 9, 612994.

- Bisht, D., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., Singh, A., Montero, E. C., ... & Twala, B. (2022). Imperative Role of Integrating Digitalization in the Firms Finance: A Technological Perspective. *Electronics*, 11(19), 3252.
- Flechsigg, C., Anslinger, F., & Lasch, R. (2022). Robotic Process Automation in purchasing and supply management: A multiple case study on potentials, barriers, and implementation. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 28(1), 100718.
- Hess, D. J. (2019). Cooler coalitions for a warmer planet: A review of political strategies for accelerating energy transitions. *Energy Research & Social Science*, 57, 101246.
- Jamil, S. (2021). From digital divide to digital inclusion: Challenges for wide-ranging digitalization in Pakistan. *Telecommunications Policy*, 45(8), 102206.
- Klein, V. B., & Todesco, J. L. (2021). COVID-19 crisis and SMEs responses: The role of digital transformation. *Knowledge and Process Management*, 28(2), 117-133.
- Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings. *Telecommunications policy*, 44(6), 101976.
- Lahsen, M., & Ribot, J. (2022). Politics of attributing extreme events and disasters to climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13(1), e750.
- Leckel, A., Veilleux, S., & Dana, L. P. (2020). Local Open Innovation: A means for public policy to increase collaboration for innovation in SMEs. *Technological Forecasting and Social Change*, 153, 119891.
- Machado, C. G., Winroth, M., Almström, P., Ericson Öberg, A., Kurdve, M., & AlMashalah, S. (2021). Digital organisational readiness: experiences from manufacturing companies. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 32(9), 167-182.
- Manita, R., Elommal, N., Baudier, P., & Hikkerova, L. (2020). The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. *Technological Forecasting and Social Change*, 150, 119751.
- Mattioli, G., Roberts, C., Steinberger, J. K., & Brown, A. (2020). The political economy of car dependence: A systems of provision approach. *Energy Research & Social Science*, 66, 101486.
- Myeong, S., & Jung, Y. (2019). Administrative reforms in the fourth industrial revolution: the case of blockchain use. *Sustainability*, 11(14), 3971.
- O'Donovan, N. (2020). From knowledge economy to automation anxiety: a growth regime in crisis?. *New political economy*, 25(2), 248-266.
- Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying digital transformation paths in the business model of SMEs during the COVID-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 104.
- Rahadi, D. R., & Wardiman, C. (2022). Strategi Pemasaran Umkm di Masa Pandemi Covid-19. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(1), 96-106.
- Roblek, V., Meško, M., Pušavec, F., & Likar, B. (2021). The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises. *Frontiers in Psychology*, 12, 592528.

- Sajari, A., Haron, H., Ganesan, Y., & Khalid, A. A. (2023). Factors influencing the level of ethics and integrity in Malaysian public sector. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 141-158.
- Scupola, A., & Mergel, I. (2022). Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101650.
- Simonofski, A., Fink, J., & Burnay, C. (2021). Supporting policy-making with social media and e-participation platforms data: A policy analytics framework. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101590.
- Valle-Cruz, D., Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Ruvalcaba-Gomez, E. A. (2020). Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101509.